

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN
KOMPENSASI PEMBAGIAN HASIL KEBUN DAMAR**

(Studi di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

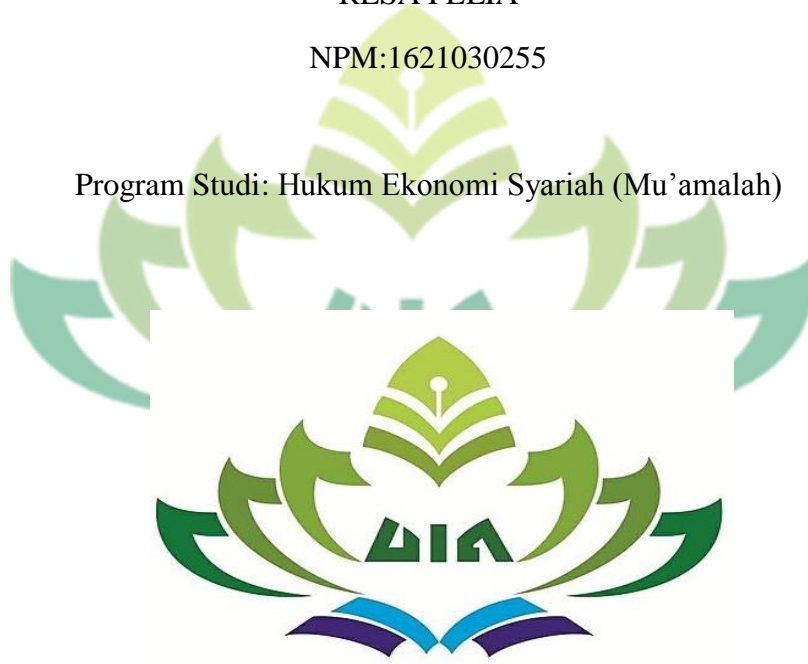
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah

Oleh

RESA PELIA

NPM:1621030255

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYAR'IAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG
DENGAN KOMPENSASI PEMBAGIAN HASIL KEBUN DAMAR
(Studi Di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**RESA PELIA
NMP: 1621030255**

Program Studi: Mu'amalah

**Pembimbing I : Drs.Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Badruzzaman,S.Ag.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN
KOMPENSASI PEMBAGIAN HASIL KEBUN DAMAR
(Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)

Hutang piutang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

Praktek hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Masyarakat terpaksa melakukan hutang piutang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat yang diberikan oleh pemberi hutang.

Adapun dibahas dalam penelitian ini masalah yang dapat di rumuskan adalah bagaimana praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik tersebut.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Dengan populasi 9 orang untuk dijadikan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yaitu penghutang meminjam jumlah uang yang tertentu dengan jaminan kebun damar dan hasil kebun damar dibagi menjadi dua tanpa mengurangi kadar hutang. Adapun hasil penelitian dalam persepektif hukum Islam bahwasannya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan duniawi. Menurut masyarakat sekitar bahwasannya hutang piutang seperti ini sering terjadi karena memudahkan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resa Pelia
NPM : 1621030255
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan kompensasi pembagian Hasil Kebun Damar"** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 22 Juli 2020
Penulis,

Resa Pelia
NPM. 1621030255



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Resa Pelia

Npm : 1621030255

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang
dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar
(Studi di Pekon Tempakak Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Wansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)" disusun oleh **RESA PELIA, NPM : 1621030255**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020

TIM PENGUJI

Ketua

: Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris

: Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji Utama

: Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

(.....)

Penguji Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

(.....)

Penguji Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khoiruddin, M.H.I.
NPM. 1621030255

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S *Al-Baqarra* (2) : 245)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menepaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. kedua orang tuaku tercinta, Ayah Izwan dan Ibu Nelvia Susita yang selalu mendoakan dan membimbing setiap langkahku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tidak dapat terbalaskan keringat yang telah kalian cucurkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang telah kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Untuk kedua adikku yang tersayang Feni Amelia dan Vareha Yati, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman yang akan selalu aku ingat.

RIWAYAT HIDUP

Resa Pelia dilahirkan di Tembakak pada tanggal 18 oktober 1998, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Izwan dan ibu Nelvia Susita. Resa Pelia memiliki 2 saudara kandung adek yaitu Feni Amelia, Vareha Yati.

Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 3 Way Sindi kec. karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, lulus dan berijazah 2010. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di Mts Al-Fatah Natar Lampung Selatan, lulus dan berijazah 2013, dan melanjutkan SLTA di MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan, lulus dan berijazah 2016. Kemudian pada tahun 2016, diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) di Fakultas syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 22 Juli 2020

Resa Pelia

Npm. 1621030255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan petunjuk, sekarang skripsi dengan judul “ TINJAUN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN KOMPENSASI PEMBAGIAN HASIL KEBUN DAMAR” (studi di Pekon Tembakak kec.karya Penggawa Kab. Pesisir Barat) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terimakasih yang secara rinci disampaikan kepada:

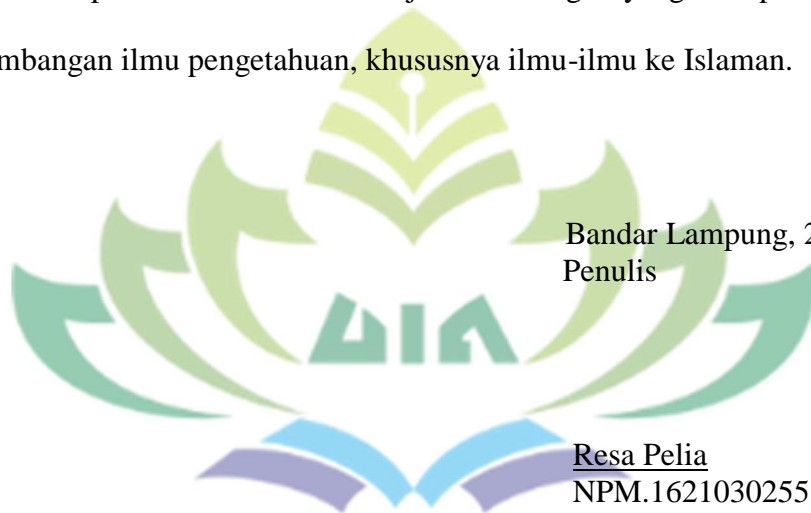
1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoirudin, M.S.I dan ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing 1 dan Badruzzaman, S.Ag.,M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staf kasubag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak Yuzwardi selaku kepala desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
8. Sahabat seperjuanganku Syifa Yulita, Misi Suci Yanti, Lia kartika, Andela, Siti Nur Azizah, dan Pitriyana yang selalu ada dan selalu berjuang bersama-sama serta memberikan motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Muamalah E angkatan 2016 dan teman-teman KKN 96 Merabung 1 Kelurahan Negeri Agung

kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang memberikan semangat dan kebersamaannya.

10. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis kuasai untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Mudah-mudahan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman.



Bandar Lampung, 22 juli 2020
Penulis

Resa Pelia
NPM.1621030255

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
G. Signifikansi penelitian.....	7
H. Metode penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Teori	
1. Hutang Piutang dalam Islam	14
a. Pengertian Hutang Piutang	14
b. Dasar Hukum Utang Piutang	17
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang	24
2. Pinjaman dengan Jaminan Dalam Islam	29
a. pengertian Al-Rahn	29
b. Dasar Hukum Al-Rahn	33
c. Rukun dan Syarat –Syarat Al-Rahn	37
d. Maqasid Syariah Dalam Jamianan Utang Piutang	42
e. Dampak Rahn.....	45
B. Tinjauan pustaka	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN 50

- A. Profil Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 50
 - 1. Sejarah Berdirinya Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 50
 - 2. Kondisi Geografis 51
 - 3. Kondidi Ekonomi Dan Sosial 52
- B. Praktek Hutang Piutang Dengan Jaminan Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar di Pekon Temabaka Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 60

BAB IV ANALISA DATA 68

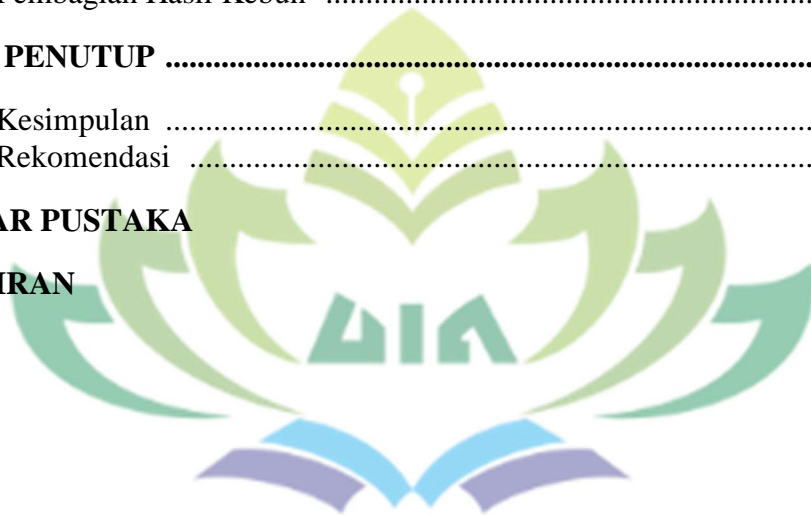
- A. Akad Praktek Hutang Piutang Dengan Jaminan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun 68
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun 70

BAB V PENUTUP 74

- A. Kesimpulan 74
- B. Rekomendasi 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang terdapat didalam judul.Maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul, Judul dari skripsi ini adalah **“Tinjaun Hukum Islam Tentang Hutang Piutang dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu Hasil Meninjau; Pendapat (Sesudah Menyelidiki, Mempelajari).¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan seorang hamba yang terkandung di dalam sumber *Al-Qu'an* dan *Sunnah* baik itu ketetapan langsung maupun ketetapan tidak langsung.²

Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.³ Sedangkan Piutang yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa Indonesia edisi keempat*, (Jakarta :Dapartemen pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama ,2011),h.1470.

² Bunyana Shalihin ,*Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta :Kreasi Total Media,2016),h.11.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia ,2012),h.177.

lain).⁴ Adapun pengertian hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk dikembalikan kepadanya dalam jumlah yang sama setelah mampu mengembalikannya.⁵

Kompensasi merupakan ganti rugi pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, pencairan kepuasan di suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan di bidang lain, imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan di perusahaan atau organisasi.⁶

Bagi Hasil adalah perjanjian pengolahan lahan dengan upah yang diperoleh dari hasil dari lahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan Objektif

Karena masyarakat masih banyak melakukan transaksi hutang piutang dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, yakni dengan membagi dua hasil panen tanpa mengurangi hutang.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta :Rineka Cipta ,2007),h.363.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Penerjemah Syaiful Islam Jilid 3* (Bandung: Al-Ma'arif 1996) h.,144.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka ,1994), h 585.

2. Alasan Subjektif.

- a. Penelitian ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, khususnya diprodi muamalah.
- b. Judul ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari pada Fakultas Syariah yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT Sebagai *Zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi kita umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesamanya.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'amalah*. Dalam *mu'amalah* manusia diberi kekuasaan untuk menjalankannya, namun dalam menjalankan proses *mu'amalah* manusia harus melaksanakannya menurut prosedur dan aturan yang telah ditentukan oleh *syari'ah*. Sejak dahulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah di antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sering melakukan transaksi hutang piutang.

Secara umum utang piutang adalah memberi sesuatu kepada orang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun hutang piutang yang melalui proses akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.⁷ Hutang piutang juga dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang di beri tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah di tentukan .⁸ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang agar tidak terjadinya perselisihan maka dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.37.

⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung :Permatanet Publishing, 2016), h.123

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Salah satu bentuk tolong menolong dalam upaya untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan ekonomi seseorang adalah dengan memberi pinjaman kepada orang yang memiliki kebutuhan mendesak sedangkan dia belum mempunyai uang seperti untuk berobat dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Islam sangat menganjurkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan.

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya *sunnah*, tetapi bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang itu benar-benar membutuhkannya, karena jika tidak di beri pinjaman maka orang tersebut akan kesusahan, sehingga hutang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum bagi orang yang memberi hutang adalah *sunnah*, bahkan wajib (bagi orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila digunakan untuk maksiat)¹⁰

Masyarakat di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, mayoritas adalah petani damar dan pendapatannya tergantung dengan hasil kebun damar yang masa panen

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 49

¹⁰ Khumedi Ja'far,.....,h.124

biasanya sebulan sekali. Dengan situasi perekonomian seperti itu, sebagian masyarakatnya sering melakukan transaksi hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar. Adapun yang menjadi alasan masyarakat melakukan transaksi tersebut adalah karena kebutuhan yang mendesak yaitu untuk pembayaran sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam transaksi hutang piutang ini, pihak yang berhutang memberi jaminan berupa kebun damar kepada pihak yang memberikan hutang, dengan ketentuan kebun damar yang menjadi jaminan hutang tersebut masih boleh digarap oleh pihak yang berhutang. Apabila kebun damar tersebut telah memasuki masa panen maka hasil dari panen kebun damar dibagi dua selama hutang itu belum dilunasi, tanpa mengurangi jumlah nilai hutang. Sehingga dengan adanya transaksi hutang piutang seperti itu maka dimungkinkan akan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan bagaimana status hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar yang terjadi dimasyarakat Tembakak itu? Hal ini sudah untuk itulah penulis pada kesempatan ini mengangkat topik tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar di Pekon Tembakak, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

D. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, dilihat dari persepektif hukum Islam adapun lokasi penelitian dilakukan di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun tersebut?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikasi penelitian

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademisi khususnya dalam masalah hutang piutang di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan gambaran serta

informasi kepada masyarakat terkait praktik hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan di desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .

b. Sifat Penelitian

¹¹ Cholid Norobuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan memuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana praktek Hutang Piutang dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Pekon Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini didapat pandangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari orang berhutang, yang memberi hutang, dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya: lewat orang lain, atau lewat

¹² Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta:Rajawali Pers 1992),h.18.

dokumen.¹³ Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku–buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian .¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang yang berhutang dan 2 orang yang memberikan hutang dengan cara kompensasi bagi hasil kebun damar di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁵ Untuk menggunakan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik.¹⁶ Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah diambil dari populasi yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang yang berhutang dan 2 orang yang memberikan hutang.

4. Teknik pengumpulan Data

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*, (Bandung :Alfabeta ,2011) h,137.

¹⁴ Muhammad, *Metode penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta :Rajawali Persada ,2008)h,161.

¹⁵ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta : UI Press,2002),h, 172.

¹⁶ Moh.Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* , (Jakarta :Bumi Akasara,2006),h. 46.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan praktik hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar di desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁸ Dalam hal ini peneliti datang langsung ke tempat penelitian dan melakukan pengamatan terhadap beberapa hal yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2017), h.168.

¹⁸ Sugiyono,h.145.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen–dokumen.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip–arsip atau berupa dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti ril terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.

5. Analisa Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data diolah secara kualitatif mengikuti suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang–orang yang telah diinterview. Setelah pengelolaan selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis secara logis dan sistematis. Teknik yang digunakan dengan analisis data adalah teknik induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidak-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat menemukan data.²⁰

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara ,2008),h.69.

²⁰ Drs.Susiadi, M. Sos.I., *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2005), h.4.

Hasil tersebut kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hutang Piutang Dalam Islam

a. Pengertian Hutang Piutang

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, secara etimologis kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.²¹

Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang-piutang.²² Adapun secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-*

²¹ A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqih Sunnah jilid XII*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 129.

²² Khumedi Ja'farh.123

qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁴

Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *Al-Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'I* atau *aqad* saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁵

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah utang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.²⁶

Secara terminologi *syara'* ulama *fiqih* berbeda pendapat dalam mendefinisikannya²⁷

a. Menurut Hanafiyah

hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b. Menurut Malikiyah

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Bandung: kencana, 2012) h.331

²⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia cet. Ke-1*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998) h.689

²⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131.

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hal 46.

²⁷ Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Rajawali press, 2014), h.92.

hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan imbalan.

c. Menurut Imam Syafi'i,

Hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminology) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).²⁸

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lain.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

Adapun *Qardh* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada larangan dari *syari'at* dan karena sudah keluar dari jalur kebijakan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.

²⁸ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2000) h.56.

b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah bukan karena hutang tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antar manfaat dan mudharat serta pemberian serta penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

b. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong.²⁹ Segala amal perbuatan manusia, tingkat laku dan

²⁹ Khumedi Ja'far,, h.123.

tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah:

- a. Dasar hukum *qard* yang tercantum dalam Al-quran yaitu:

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
(Al-Baqarah (2) :245)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan amal saleh dan memberi *infaq fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- b. Dasar hukum *qardh* yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa semua kaum muslim telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh

karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.



c. Berdasarkan hadis

Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun hal *ihwal*.³⁰ Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an, di dalam hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum utang piutang antara lain:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلًا فَهِيَ آتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka Allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya. (HR Al-Bukhari no. 2387)³¹

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah SWT akan membagikan balasan berlipat-lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesempatan ulama ini

³⁰M.Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), hal.15

³¹Ahmad bin Muhammad, Al-shafi'i Al-Qastalani, *Irshadu Al-sari Lisharhi Sahihi Al-Bukhari*, Juz 5,(Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah,2009),h.379.

didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 yang menetapkan bahwa:

1. ketentuan *Umum al-Qardh*

- a) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 19 *al-qardh* 3 Dewan Syariah Nasional MUI.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *al-qaradh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. sumber dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari :

- a) Bagian Modal LKS.
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Administrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³²

Menurut uraian di atas tidak adanya larangan dalam suatu perjanjian utang piutang apabila tidak melanggar hukum dan sesuai aturan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak melarang adanya suatu perjanjian utang piutang, apabila memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan menurut syara' maka praktik utang piutang diperbolehkan.

Dalam utang-piutang terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

³² Fatwa Dewan Nasional-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *Utang Piutang*

وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّنُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْتَقُوا لِلَّهِ أَنْتَقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-baqarah :282)³³

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut

³³ Departemen agama RI, al-Quran dan terjemahan, (bandung: penerbit diponegoro, 20000),h 49

akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi *makruh* jika benda yang diutang itu tidak untuk kemaslahatan dan tidak untuk perbuatan maksiat, hutang saja tidak ada keperluan apa-apa.

Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

c. Rukun dan syarat utang piutang

Dari pengertian utang piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli:

a. Rukun Utang Piutang

1. *'aqid* yaitu pihak yang berpiutang terdapat dari pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*).
2. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkan.

3. *Sighat* yaitu *ijab qabul*. Yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul* atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan surat terlaksananya suatu transaksi.³⁴

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

1. Orang yang memberi utang.
2. Orang yang berutang.
3. Barang yang diutangkan.
4. Ucapan *ijab qabul*.³⁵

Menurut M.Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga, yaitu:

1. Lafaz (*ijab qabul*)
2. Yang berutang dan berpiutang
3. Barang yang diutangkan.³⁶

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dengan transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

1. Rukun *Qardh*

- a. Orang yang memberi utang.

Orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (*baligh* dan berakal)

³⁴Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok:Usaha Kami,1996) h.93

³⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Primayasa,1997) h.110

³⁶Ali Hasan, *Transaksidalam Islam*, (Jakarta:Usaha Kami,1996) h .243

b. Orang yang berutang

Orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (*baligh* dan berakal)

c. Objek atau barang yang diuntungkan

Dalam hal ini barang yang diuntungkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

d. *Lafadh* (*ijab* dan *qabul*)

Lafadh (*ijab* dan *qabul*) adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Dari pendapat-pendapat di atas pada dasarnya sama, dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Berakal
- b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
- c. Bukan untuk memboros
- d. Dewasa dalam hal baligh

2 Syarat utang piutang

A. *Aqid* (dua belah pihak yang berakad)

- a) Baligh yaitu dapat bertindak hukum artinya berakal sehat atau merdeka.

- b) *Muqaridh* yaitu pihak yang memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabbarru'* artinya harta yang diutang merupakan milik sendiri. Pendapat ulama *syafi'ah ahliyah* (kecakapan dan kepantasan) pada akad *qaradh* harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Menurut ulama *hanabillah* untuk pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.

B. *Mauqud' alaih* (objek utang)

- a) Harta yaitu harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat di hitung yang diungkapkan adalah mal misliyat.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta dapat ditukar, ditimbang dan dihutang, atas dasar ini tidak diperbolehkannya mengutangkan manfaat (jasa)
- c) Al-qubad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima. Karena didalam akad *qaradh* ada *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang menguntangkan (*muqridh*)

- e) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga yang sama. Artinya menjadi tanggung jawab orang yang berhutang.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dipergunakan dalam Islam.
- g) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

C. Ijab dan Qabul (*sighat al-aqd*)

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Qabul berupa lafal *qardh*. Akad *qardh* yang dimaksud adalah untuk saling tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan semata. Karena di dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang memberi utang atau orang yang menghutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba.

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul maksud yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak.

2. Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Islam

a. Pengertian *Al-Rahn*

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.³⁷

Gadai menurut bahasa Arab adalah *rahn* yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga *al-hasbu* artinya penahanan. Seperti dikatakan “*Ni'matun Rahinah*” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.³⁸ Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.³⁹

Rahn secara etimologi berarti kata tetap, kekal dan jaminan, Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa ada beberapa defenisi *ar-rahn* yang ditemukan para ulama fiqh, ulama malikiyah mendefinisikannya dengan:

*“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”*⁴⁰

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1

³⁸ Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk*, (Bandung: Alma'rif, 1997), h.139.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h. 105.

⁴⁰ Dr. H, Nasrun Haroen,. Ma, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h, 251.

Secara termologi, *rahn* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagai dari manfaat barang itu.⁴¹
- b. Menurut fatwa DSN-MUI, *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atau utang.⁴²
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah
“menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang
“.⁴³ Ulama syafi'iyah mendefenisikan akad *ar-rahn* seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar. Kalimat menjadikan suatu benda
“mengandung makna bahwa kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karna itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.
- d. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴⁴

⁴¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015) , h,246.

⁴²Fatwa DSM-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

⁴³ Khumedi Ja,far, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.214.

⁴⁴Pasal 20 angka (14) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

e. Menurut Al-Bujairami

Rahn adalah menyerahkan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Makna yang hampir mirip tentang *rahn* ini dikemukakan oleh Ibn Qudamah. Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qudamah mengertikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.⁴⁵

Gadai dalam istilah bahasa arab dinamai dengan *rahn* dan dapat juga dengan *Al-Habsu*. Secara etimologi arti kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan. Dan untuk yang kedua (*Al-Hasbu*) firman Allah SWT yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٨﴾

⁴⁵Yadijanwardi, *fiqh lembaga keuangan syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.102.

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (Q.S.Al-Mudatsir : 38)⁴⁶

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai (manfaat) barangnya itu.⁴⁷

Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴⁸

Secara umum *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*Rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. Makna yang hampir mirip tentang *rahn* ini dikemukakan oleh Ibn

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 576

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaladun A. Marjuki jilid 12 (bandung : PT Al-Maarif, 1993), h. 139

⁴⁸ R. Subekti Dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 297.

Qudamah. Dengan menutip pendapat ulama hanabilah, *Ibn Qudamah* mengartikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa *rahn* dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak meminjam uang atau barang.⁴⁹

b. Dasar Hukum Al-Rahn

Dasar hukum diperbolehkan *rahn* atas dasar firman Allah, *sunnah* Rasul dan *ijma*, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum diperbolehkan *rahn* dengan bermuamalah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah:283 yaitu

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh

⁴⁹ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h 102.

yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁰(QS. Al-Baqarah: 283).

b. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad *rahn* adalah hadis Rasulullah SAW. Yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:” Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW membeli makan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”⁵¹

c. Hadis Nabi riwayat Al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW., bersabda :” tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ,ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.

d. Hadis Nabi riwayat Jam’ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa’I, Nabi SAW bersabda: tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (bandung :penerbit diponorogo,2000),h.71

⁵¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 140.

digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

e. Ijma: para ulama sepakat membolehkan akad rahn, (al-Zuhaili, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181)

f. Ijma Ulama

Para ulama semua berpendapat, bahwa akad *rahn* hukumnya *mubah* (boleh) namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu akad *rahn* hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak Zahiri. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum akad *rahn* dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW yang menjamin baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang. Berkaitan dengan perbolehan perjanjian akad *rahn* ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis di atas.⁵²

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 139

gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah menentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) *rahin* dipaksakan untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk dipegang oleh *murtahin*. Jika jaminan sudah berada ditangan murtahin, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan Asy-Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.⁵³

Berdasarkan surat al-baqarah ayat 283, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya adalah karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang /dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi angunan utang). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah maka dikuasai (*al-*

⁵³ Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012), h. 174.

qabdh) adalah surat tanah maka dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat tanah (sertifikat tanah).⁵⁴

Kaum muslim juga telah bersepakat (*ijma*) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadinya karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.⁵⁵

Produk hukum lain yang berbicara tentang *rahn* adalah Fatwa DSN MUI. Ada tiga Fatwa yang terkait *rahn* ini, yakni Fatwa DSM –MUI Nomor : 5/ DSN-MUI/III/2002. Tentang *rahn*, Fatwa DSN – MUI Nomor: 26/DSN-MUI-III/2002 tentang *Rahn* Emas, FatwaDSM –MUI Nomor :26/DSM-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily.⁵⁶

g. Kaidah FIKIH: pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁷

c. Rukun dan Syarat-syarat *Al-Rahn*

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *murtahin* (orang yang menerima barang jaminan), keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *tabligh* dan berakal. Oleh karena itu akad *rahn* tidak sah dilakukan

⁵⁴ Elimartati, *Perbedaan ar-rahn dan bay' al-wafa'*, tinjauan *faruq fiqiyah*, vol 11, No 2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 324.

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia.2012), h. 195.

⁵⁶ *Rahn* Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* misalnya sertifikat

oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, *mumayyiz* adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia *baligh* akan tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik.

2) *Marhum bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, dilunasi dengan *marhum* (barang jaminan), dan tiga utang itu pasti dan jelas baik zat dan sifat maupun keadaannya.

3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa disyaratkan pada *marhum* adalah yang disyaratkan pada jual beli.

Adapun syarat-syarat mahrun (barang yang dijadikan jaminan).

a. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.

b. Barang jaminan (*marhun*) itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqqawwin* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu tidak sah menggadaikan bangkai, *khamar*, karena tidak dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.

c. Barang Jaminan (*Mahrhun*) itu jelas dan tentu

d. Barang Jaminana (*marhun*) milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya. Menurut ulama Hanafiyah syarat

marhun harus milik *rahin* bukan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*.⁵⁸

- e. Barang Jaminan (*marhun*) tidak terkait dengan milik orang lain.⁵⁹
 - f. Barang jaminan (*marhun*) harus dapat dipilih artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
 - g. Barang Jaminan (*marhun*) itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
 - h. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat diserahkan terimakan, tidak materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).
- 4) *Sighat*, akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *rahn* dibarangi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad menyerahkan apabila tenggang waktu utang telah habis

⁵⁸ Wabih Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani Darul fikri, Cet., ke-3, 2011), h. 137.

⁵⁹ <http://yullyamberry.blogspot.co.id/2014/06/al-rahn-gadaipinjamandenganjaminan.html?m> diakses pada tanggal 26 november 2019 .

dan utang belum dibayar maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan atau pemberi utang menyerahkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Menurut ulama Hanafiah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karena syarat tersebut batal.

a. Syarat kesempurnaan

Adapun syarat sempurnanya akad *rahn* yaitu syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *rahin*, maka akan *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.⁶⁰ Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283

⁶⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Tijiriyah al-Kubra, 1969), h. 327-328.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶¹

Para ulama berselisih pendapat masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua ulama berselisih pendapat dalam hal ini, yaitu jumhur ulama berpendapat, *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sahnya akad rahn, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad rahn. Maka *rahn* itu belum mengikat kecuali terjadinya serah terima benda yang digadaikan.⁶² Pendapat ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283.

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad *rahn* kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu *al-qabadh*

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h.71.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke-3, 2011), h. 137.

merupakan syarat kesempurnaan akad *rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. Ulama Malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum. Disyaratkan dalam *Al-Rahn* sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi)
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *Al-Marhun* (barang gadai)
- 3) Syarat berhubungan dengan *Al-Marhun bihi* (hutang).

d. Maqasid Syariah Dalam Jaminan Utang Piutang

Pengertian *Maqasid Syariah* secara bahasa berasal dari kata “syara’ah as-syai” dengan arti menjelaskan sesuatu”. Atau ia diambil dari kata “asyir’ah” dan “asy-syariah” dengan “arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat”.

Secara istilah, Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah “menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.⁶³

⁶³ Ibn Qayyim al-jauziyah, I’iam al-Muwaqqi’in, jilid 3, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),h.37.

Sedangkan *Maqasid syariah* dalam pengertian umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁴

Maqasid al-syari'ah dalam arti Maqasid al-syari', mengandung empat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai Sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syariat adalah membawa naungan hukum

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang di sebut dengan istilah tersebut merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah:

a. Perlindungan terhadap agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akibat yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Dan di lain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap

⁶⁴ Ibid.,h.39

pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk perpindah keyakinan untuk masuk Islam.⁶⁵

b. Perlindungan terhadap nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan.

c. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia pemimpin dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai dan berbeda dengan makhluk lainnya.

d. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Ghofindo persada, 2005), h.63.

berdiri sebagai penghalang antar sirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

e. Perlindungan terhadap keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsanat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum – hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Dampak dari *rahn*

Jika akad *rahn* telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan borg kepada *murtahin*, maka terjadilah beberapa dampak yaitu:

- a. Adanya utang untuk *rahin*
- b. Hak untuk menguasai borg

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada *rahn* bergantung pada borg yang dipegang *murtahin*, sedangkan

menurut ulama Syafi'iyah penguasaan borg semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*.

c. Menjaga barang gadaian

Ulama hanafi'yah berpendapat bahwa *murtahin* harus menjaga borg sebagaimana menjaga barang miliknya, jika rusak atas kelalaian *murtahin*, ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

d. Pembiayaan atas borg

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *rahin*, menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* bertanggung jawab atas pembiayaan borg.

e. Pemanfaatan *rahn*

Jumhur ulama selain Syafi'Iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan borg, ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudarkan *murtahin*. Fuqoha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.⁶⁶

⁶⁶Puspitagiana.blogspot.com diakses pada tanggal 04 Desember 2019

e. Tinjauan Pustaka

1. skripsi Anisa Apriyani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Dari kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya adalah:
 - a. Praktek hutang piutang dengan jaminan kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ini terjadi dikarenakan karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi yang terjadi di Perumahan Kopkar DWI Karya sangatlah minim sehingga mengharuskan warganya meminjam dengan menggunakan jaminan yaitu menggunakan kartu ATM. Dimana pihak kreditur hanya akan memberikan pinjaman jika menggunakan kartu ATM yang telah diisi dan mewajibkan memberitahu pin dari kartu ATM tersebut dan mengikuti aturan yang diberikan oleh pihak kreditur dengan dikenakannya bunga sebesar 20% dari pinjaman pokok tersebut dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Dalam pandangan Hukum Islam tentang Hutang Piutang dengan jaminan kartu atm pada dasarnya dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut aturan Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun tidak terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu. Dari

maqasid syariah tidak mengandung kemaslahatan didalamnya tidak terdapat didalamnya karena tidak mengandung manfaat didalamnya dimana barang yang dijadikan jaminan itu adalah kartu ATM dimana masih banyak barang lain yang dapat dijadikan jaminan utang piutang. Karena kartu ATM ini sebenarnya sangatlah pribadi.

2. Skripsi dari Amelia Andriyani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat.

Hasil penelitian Amelia menunjukkan:

- a. Utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Kec.Menggala Timur dengan kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada debitur.Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.
- b. Menurut hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan Al-Qardul Hasan atau hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan.Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam prakteknya hutang

piutang bersyarat yang terjadi di desa Tri Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meskipun dalam tema, penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya, namun Nampak jelas ada perbedaan hal mana dan segi lokasi berbeda dan dari segi permasalahan yang dibahas pun memiliki perbedaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Marzuki Kamaluddin, *Fiqih Sunnah jilid XII*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 3*, Mesir: al-Maktabah al-Tijiriyah al-Kubra, 1969.
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam,Utang Piutang ,Gadai*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000.
- Ahmad bin Muhammad, Al-shafi'i Al-Qastalani, Irshadu Al-sari Lisharhi Sahihi Al-Bukhari, Juz 5, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah,2009.
- Ali Hasan, *Transaksidalam Islam*, Jakarta: Usaha Kami,1996.
- Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Brata Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres, 1992.
- Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*,kreasi, Total Media, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.2006.
- Dapartemen pendidikan dan kebudayaan ,*kamus besar bahasa Indonesia* cet. Ke-1Jakarta:Balai pustaka,1998.
- Dapertemen Agama RI,*Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Dapertemen Pendidikan Nasioanal Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta: 1994.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Dr. H, Nasrun Haroen,. Ma, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Drs.Susiadi, M. Sos, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2005.

Fatwa DSM-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002 *tentang rahn*.

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta: Rajawali press, 2014.

Husaini Usman, purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ibn Qayyim al-jauziyah, *I'iam al-Muwaqqi'in*, jilid 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia 2012.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* , Yogyakarta: Dana Bakhti Primayasa, 1997.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: PermataNet Publishing, 2016.

Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

M. Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Bandung: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2015.

Moh. Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Daud Ali, *hukum islam*, Jakarta: Raja ghofindo persada, 2005.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Persada, 2008.

Pasal 20 angka (14) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

R.Subekti Dan R.Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet 40, Jakarta:Pradnya Paramita,2009.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk*, Bandung: Alma'rif, 1997.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Penerjemahan Syaiful Islam jilid 3*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H.Kamaladun A.Marjuki jilid 12, bandung : PT Al-Maarif,1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, Depok:Usaha Kami,1996.

Soejarno Soekanto, *Pengantar Pelatihan Hukum* , Jakarta: UI Press, 2002.

Sudarsono Heri, *Bank& Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012.

Sudarsono, *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian dan kualitatif dan ARD*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Wabah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani Darul fikri, Cet., ke-3, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke-3, 2011.

Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Elimartati, *Perbedaan ar-rahn dan bay' al-wafa' ,tinjauan faruq fiqiyah*, vol. 11, No .2, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Sumber on-line

<http://yullyambery.>

Blogspot.co.id/

2014/06/al-rah-

gadaipinjamandenganjaminan.html?m (26 November 2019)

puspitagiana.blogspot.com diakses pada tanggal 04 Desember 2019

Wawancara

Aprizal, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 3 Januari 2020

Arzak, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec. Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 3 Januari 2020

Aswadi, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 4 Januari 2020

Harto, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya PenggawaKabupaten
Pesisir Barat, 1 Januari 2020

Izal, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec. Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 3 Januari 2020

Riandi, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya Penggawa Kabupaten
pesisir Barat, 1 Januari 2020

Rudi, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 5 Januari 2020

Sunarti, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 5 Januari 2020

Taswin, Wawancara dengan Penulis, Tembakak Kec.Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, 2 Januari 2020